

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah sendiri. Hal ini berarti bahwa daerah memiliki kekuasaan atas kekayaan dan potensi yang dimiliki daerah. Dalam membahas keuangan daerah akan berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah yaitu bagaimana alokasinya bagi daerah. Pendapatan yang diperoleh daerah merupakan kemampuan yang dihasilkan daerah dalam menggali potensi kekayaan yang dimiliki daerah dengan pengawasan pemerintah daerah. Untuk melihat bagaimana pengalokasian pendapatan perlu diketahui juga bagaimana alokasi dana terhadap belanja daerah agar dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi kesejahteraan daerah.

Melalui APBD, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola penerimaan daerah yang bertujuan untuk pembangunan daerah. Berdasarkan belanja pemerintah yang tertuang dalam APBD, merupakan aktivitas rutin pengeluaran kas daerah untuk mendanai aktivitas-aktivitas operasional. Dengan meningkatnya pengeluaran daerah, membutuhkan dana yang banyak untuk mampu memenuhi kebutuhan Belanja Daerah. Terpenuhinya kebutuhan Belanja Daerah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, melalui pembangunan fasilitas-fasilitas publik. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai Belanja Daerahnya, maka melalui alokasi dana yang bersumber dari APBN dapat mendanai kebutuhan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber penerimaan yang digunakan untuk mendanaan pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan lain-lain Penerimaan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur, dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, yang menyimpulkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Pendapatan Kota Padang jika ditinjau menurut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan hampir mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Untuk

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan tiga belas tahun terakhir, seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kota Padang
Tahun 2003-2015
(Rp.Juta)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan
2003	63.932,54	305.005,67
2004	68.646,57	320.866,22
2005	87.261,58	353.263,05
2006	98.546,20	622.801,90
2007	104.870,42	677.797,35
2008	117.728,89	754.710,66
2009	113.318,41	732.818,46
2010	116.691,28	741.044,46
2011	149.874,80	828.149,46
2012	189.450,84	1.044.585,81
2013	238.871,89	1.142.675,96
2014	315.678,80	1.182.290,91
2015	370.413,17	1.169.080,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang

Terlihat pada tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun 2003-2008 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, meski pada tahun 2009 mengalami penurunan, namun pada tahun 2010-2015 selalu mengalami peningkatan. Realisasi pada Dana Perimbangan selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Selama periode 2003-2015 Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 15,76 persen dan Dana Perimbangan sebesar 11,84 persen rata-rata pertahun.

Kemampuan keuangan suatu daerah setelah otonomi daerah dituntut untuk dapat membiayai diri sendiri melalui sumber keuangan yang dikuasai dan kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya. Sehingga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan

daerah, guna menunjang terselenggaranya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Maka berdasarkan uraian yang tergambar pada realisasi PAD dan pada Dana Perimbangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Studi Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kota Padang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2003-2015?
2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2003-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2003-2015.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Padang 2003-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, bagi Instansi Pemerintahan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan dan bahan acuan dalam rangka upaya peningkatan kemampuan keuangan pemerintahan daerah. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan

khususnya mengenai keuangan daerah terkait Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup Kota Padang, dengan variabel dependen Belanja Daerah, dan variabel independen yaitu Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah. Dengan periode analisis pada tahun 2003-2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah pembahasan terbagi atas beberapa bab dan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori dan studi literatur yang terkait dengan definisi otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi, keuangan daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dalam penelitian sebelumnya yang menjadi acuan bagi penulis, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode pengumpulan data, sumber data dan metode pengolahan data yang akan digunakan dalam melakukan

analisis bagaimana pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah bagi Belanja Daerah.

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PADANG

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Kota Padang yang meliputi kondisi geografis dan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, perkembangan PAD dan Dana Perimbangan Sumatera Barat, perkembangan pendapatan menurut sumber penerimaan Kota Padang, Belanja Rutin Pemerintah, perkembangan PAD dan Dana Perimbangan Kota Padang.

BAB V HASIL DAN KAJIAN EMPIRIS

Bab ini menjelaskan hasil analisis terhadap faktor atau karakteristik yang signifikan dalam mempengaruhi Belanja Daerah dengan pengolahan data menggunakan metode regresi berganda.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian berdasarkan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah bagi Belanja Daerah Kota Padang.

